



Analysis of the Impact of Efficiency and Budget Cuts on the Treasurer's Inventory Money of the Directorate General of Dukcapil of the Ministry of Home Affairs

Abdul Kadir¹, Silvia², Selvi Trasviyanti³, Sugiyanto⁴

abdulkadir30081969@gmail.com¹, silv7158@gmail.com, trasviyatiselvi@gmail.com,

dosen00495@unpam.ac.id

Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

ABSTRACT

This study examines the impact of efficiency policies and budget cuts on the management of the treasurer's inventory money at the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs. The implementation of government efficiency measures and fiscal tightening has raised concerns regarding the flexibility and effectiveness of inventory money in supporting daily operational activities. The purpose of this research is to analyze how efficiency and budget reduction policies affect planning, utilization, control, and accountability of the treasurer's inventory money. This study employs a qualitative research method using in-depth interviews with relevant officials, analysis of financial and administrative documents, and direct observation to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon. The results show that efficiency policies and budget cuts lead to reduced flexibility in fund utilization, increased administrative burden for treasurers, and the need for adjustments in financial management practices. Although these policies strengthen financial discipline and accountability, they also create challenges in responding to urgent operational needs and maintaining service performance. The study concludes that effective management of treasurer's inventory money under efficiency and budget cut policies requires adaptive strategies, improved coordination, and clear regulatory guidance to ensure public service delivery remains effective while upholding principles of transparency and accountability.

Keywords: Efficiency policy, Budget cuts, Treasurer's inventory money, Public financial management, Qualitative research

PENDAHULUAN

Kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran merupakan instrumen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut berdampak langsung pada mekanisme pengelolaan keuangan di tingkat satuan kerja, termasuk pengelolaan uang persediaan yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran. Uang persediaan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional harian instansi pemerintah, terutama pada unit kerja yang memiliki intensitas pelayanan publik yang tinggi seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Secara empiris, penerapan efisiensi dan pemotongan anggaran berpotensi memengaruhi fleksibilitas penggunaan dana, kecepatan respons terhadap kebutuhan operasional, serta efektivitas pelayanan publik.

Secara teoretis, pengelolaan keuangan publik menekankan keseimbangan antara efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Namun, penerapan kebijakan penghematan anggaran sering kali menimbulkan dilema antara pengendalian belanja dan kebutuhan riil operasional. Kondisi ini menimbulkan persoalan teoretis mengenai sejauh mana kebijakan efisiensi mampu meningkatkan tata kelola keuangan tanpa mengorbankan kinerja organisasi dan kualitas layanan publik.

Sudi-studi terbaru dalam bidang keuangan publik menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran umumnya berfokus pada pengendalian belanja, pengkatan disiplin fiskal, serta pengoptimalisasi sumber daya. Ppenelitian-penelitian tersebut banyak menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja organisasi sektor publik, efektivitas program pemerintah, dan pencapaian target pembangunan. Hasil penelitian umumnya menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan pengelolaan keuangan negara

Namun demikian, sebagian studi juga mengungkapkan adanya konsekuensi administratif dan operasional akibat kebijakan pemotongan anggaran, seperti meningkatnya beban kerja aparatur, keterbatasan ruang gerak pengelolaan keuangan, serta penurunan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat makro dan lebih menitikberatkan pada analisis anggaran secara umum, belum secara spesifik mengkaji pengelolaan uang persediaan bendahara sebagai instrumen keuangan operasional yang bersifat mikro dan teknis.

Selain itu, penelitian mengenai pengelolaan uang persediaan umumnya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur administrasi, dengan pendekatan kuantitatif atau normatif. Pendekatan tersebut masih terbatas dalam menggambarkan dinamika empiris yang dihadapi bendahara pengeluaran dalam konteks kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran yang bersifat adaptif dan situasional.

Berdasarkan kajian terhadap studi-studi terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup jelas antara fokus kajian kebijakan efisiensi anggaran dan realitas pengelolaan uang persediaan di tingkat operasional. Studi sebelumnya belum banyak mengintegrasikan analisis kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dengan praktik pengelolaan uang persediaan secara mendalam, khususnya dari perspektif pelaku langsung pengelolaan keuangan.

Selain itu, masih terbatas penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran memengaruhi perencanaan, penggunaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban uang persediaan dalam konteks institusi pelayanan publik strategis. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menggali pengalaman, tantangan, dan strategi adaptif bendahara pengeluaran dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran terhadap pengelolaan uang persediaan bendahara di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran terhadap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan akuntabilitas uang persediaan, serta mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan untuk menjaga efektivitas operasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif yang secara khusus mengkaji pengelolaan uang persediaan bendahara dalam konteks kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, sehingga memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan kajian keuangan publik di tingkat operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dampak kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran terhadap pengelolaan uang persediaan bendahara di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara kontekstual berdasarkan pengalaman, persepsi, dan praktik nyata para pelaku pengelolaan keuangan, sehingga dapat menangkap dinamika empiris yang tidak dapat dijelaskan secara

memadai melalui pendekatan kuantitatif

Subjek penelitian ini terdiri atas aparatur yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan uang persediaan, khususnya bendahara pengeluaran dan pejabat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, serta pemahaman subjek terhadap kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran serta implementasinya dalam pengelolaan uang persediaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan kaya informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi, pengalaman, dan strategi adaptasi bendahara serta pejabat terkait dalam mengelola uang persediaan di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran. Analisis dokumen mencakup telaah terhadap dokumen keuangan, laporan pertanggungjawaban, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan uang persediaan dan kebijakan anggaran. Observasi dilakukan untuk memahami praktik pengelolaan uang persediaan secara langsung dalam konteks operasional. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi dikembangkan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus kajian, serta disesuaikan dengan konteks institusi yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan observasi terlebih dahulu direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman hubungan antar konsep dan temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan makna data secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengidentifikasi implikasi kebijakan dan praktik pengelolaan uang persediaan dalam konteks efisiensi dan pemotongan anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran berdampak signifikan terhadap pengelolaan uang persediaan bendahara di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dampak tersebut terutama terlihat pada aspek perencanaan, fleksibilitas penggunaan dana, serta kecepatan pemenuhan kebutuhan operasional. Informan menyampaikan bahwa jumlah uang persediaan yang tersedia mengalami penyesuaian yang cukup ketat, sehingga memengaruhi kemampuan satuan kerja dalam merespons kebutuhan mendesak yang tidak selalu dapat diprediksi sebelumnya.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan adanya peningkatan kehati-hatian dalam penggunaan uang persediaan. Bendahara dan pejabat terkait dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran, menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang berlaku. Kondisi ini mendorong penguatan kontrol internal, namun pada saat yang sama juga mempersempit ruang gerak operasional.

Penelitian menemukan adanya perubahan pola perencanaan dan pemanfaatan uang

persediaan setelah penerapan kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran. Perencanaan yang sebelumnya bersifat relatif fleksibel kini menjadi lebih terstruktur dan konservatif. Informan menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus direncanakan secara lebih rinci dan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Salah satu informan menyatakan:

“Sejak adanya kebijakan efisiensi, kami harus benar-benar menghitung setiap pengeluaran. Tidak bisa lagi menggunakan uang persediaan untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak tanpa perencanaan yang jelas.”

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi mendorong disiplin anggaran, tetapi juga meningkatkan risiko keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan operasional yang bersifat urgent.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran berdampak pada meningkatnya beban administratif bendahara pengeluaran. Proses pertanggungjawaban menjadi lebih kompleks dan membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Bendahara dituntut untuk memastikan bahwa setiap penggunaan uang persediaan memiliki dasar administrasi yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seorang informan mengungkapkan:

“Tekanan administrasi sekarang lebih besar. Semua harus terdokumentasi dengan sangat rapi karena pengawasan juga semakin ketat.”

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran memiliki implikasi langsung terhadap fleksibilitas pengelolaan uang persediaan. Secara konseptual, efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan menghindari pemborosan. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut mendorong pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan terkontrol. Namun demikian, penurunan fleksibilitas penggunaan uang persediaan berpotensi menghambat respons cepat terhadap kebutuhan operasional yang bersifat mendesak, khususnya pada unit kerja dengan intensitas pelayanan publik yang tinggi.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran melakukan berbagai penyesuaian praktik pengelolaan uang persediaan sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran. Penyesuaian tersebut meliputi perencanaan yang lebih rinci, prioritas pengeluaran, serta peningkatan koordinasi dengan pejabat terkait. Strategi adaptif ini menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan operasional meskipun berada dalam keterbatasan anggaran.

Dari perspektif pelayanan publik, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat tata kelola keuangan dan akuntabilitas. Di sisi lain, keterbatasan uang persediaan berpotensi memengaruhi kelancaran pelayanan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan internal yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pengendalian anggaran dan kebutuhan operasional agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan uang persediaan bendahara di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendorong peningkatan disiplin anggaran, kehati-hatian dalam penggunaan dana, serta penguatan akuntabilitas dan pengendalian internal. Namun demikian, kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran juga berdampak pada berkurangnya fleksibilitas pengelolaan uang persediaan, meningkatnya beban administratif

bendahara, serta terbatasnya kemampuan satuan kerja dalam merespons kebutuhan operasional yang bersifat mendesak.

Secara kritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan efisiensi tidak hanya ditentukan oleh pengendalian anggaran semata, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menyesuaikan praktik pengelolaan keuangan secara adaptif. Temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh instansi pemerintah, mengingat karakteristik organisasi, tingkat pelayanan publik, dan kapasitas pengelolaan keuangan yang berbeda-beda. Batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup studi yang terbatas pada satu unit kerja serta penggunaan pendekatan kualitatif yang menekankan kedalaman analisis dibandingkan generalisasi temuan.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pengelolaan uang persediaan di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran didukung oleh pedoman teknis yang lebih adaptif serta peningkatan koordinasi antara bendahara, pejabat pengelola keuangan, dan pimpinan unit kerja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian ke beberapa instansi atau kementerian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan keuangan operasional. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) untuk menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif sehingga mampu memperkuat validitas temuan dan memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas.

Pernyataan Apresiasi

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, T., & Usman. (2025). *Hambatan efisiensi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia: A systematic literature review*. AZ-ZAIDA Jurnal Ilmu Multidisiplin, 1(6), 34–41. Retrieved from <https://albaayaninstitute.org/index.php/azzaida/article/view/299>
- Mustika, M., Afdillah, W., Sartika, R., & Pangestoeti, W. (2025). *Transparansi anggaran publik dan implikasinya terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah*. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik, 2(4), 1245–1250. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2881>
- UIN Sunan Ampel Surabaya, A. S., & Saifuddin, M. (2024). *Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024*. Jurnal Ilmiah Ekonomika & Sains, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.54066/jiesa.v6i2.705> [Institut Teknologi dan Bisnis Semarang](#)
- Salman, & Ikbal. (2025). *Analisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran: Ditinjau dari aspek ekonomi*. Journal of Economics Development Research, 1(2), 99–110. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.99> [Gema Cendekia Institute](#)
- Sugiyanto, S. (2018). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan pemoderasi kepemilikan institusional. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 6(1), 82–96.

- Sugiyanto, S., & Sumantri, I. I. (2019). Peran audit internal dan sistem pengendalian internal atas pengajuan kredit tanpa agunan pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 196–224.
- Sugiyanto, S., & Candra, A. (2019). Good corporate governance, conservatism accounting, real earnings management, and information asymmetry on share return. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 9–18.
- World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results*. Retrieved from <https://documents.worldbank.org>
- Zein, A. W., Riski, M., & Nasution, A. Z. P. (2025). *Efisiensi penggunaan anggaran publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1027> [Ejournal Areai](#)